BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis pada SKH Kedaulatan Rakyat pada bab sebelumnya, peneliti pada bab ini akan menyampaikan kesimpulan yang peneliti dapatkan dari hasil analisis, yaitu penerapan jurnalisme damai dalam pemberitaan Harian Kedaulatan Rakyat mengenai kasus Ahmadiyah setelah terjadinya penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik. Beberapa hal yang peneliti dapatkan, sebagai berikut :

1. Melihat dari segi tipe peliputannya, SKH Kedaulatan Rakyat berusaha untuk menyajikan berita secara proporsional, yaitu menyajikan berita - berita dari dua perspektif yang berbeda. Menurut peneliti, frekuensi berita yang menyajikan berita secara *cover both side* (dua sisi) masih sedikit kurang, karena hanya terdapat 63,9 % saja.
2. Berita yang disajikan oleh SKH Kedaulatan Rakyat sudah berfokus pada proses terjadinya konflik dan juga penyelesaian konflik, berorientasi pada "menang-menang". SKH Kedaulatan Rakyat dalam beritanya menyajikan mengenai penyebab terjadinya konflik, permasalahan yang ada serta proses penyelesaian konflik mengenai jamaah Ahmadiyah yang diarahkan agar berujung pada kemenangan kedua belah pihak.
3. Orientasi liputan dalam hal pengungkapan kebenaran kedua belah pihak yang bertikai dalam kasus Ahmadiyah belum terlaksana dengan baik, karena berita yang mengungkapkan kebenaran di kedua belah pihak hanya 13 berita saja.

SKH Kedaulatan Rakyat lebih banyak mengungkapkan kebenaran di satu pihak.

4. Penyebutan nama pelaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertikai, yang dapat memberikan stigma negatif atau kesan negatif di mata masyarakat mengenai salah satu pihak, berdasarkan hasil analisis peneliti, tampak dihindari oleh SKH Kedaulatan Rakyat. Dalam penyajian beritanya, lebih banyak tidak menyebutkan nama pelaku pelanggaran hukum sama sekali.
5. Berdasarkan hasil analisis peneliti, SKH Kedaulatan Rakyat telah mengangkat inisiatif perdamaian. Memberikan solusi atas pertikaian yang terjadi dengan menyajikan berita mengenai pihak-pihak yang berusaha mencarikan jalan keluar. SKH Kedaulatan Rakyat memberikan ruang yang cukup untuk pemikiran-pemikiran yang netral dan juga rasional, agar mendapatkan solusi yang paling kecil resikonya.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini masih jauh dari sempurna, masih banyak memiliki kelemahan dan kekurangan dalam proses penelitian. Namun, berdasarkan hasil penelitian, peneliti juga ingin memberikan saran kepada SKH Kedaulatan Rakyat, sehingga dalam pemberitaannya ke depan, SKH Kedaulatan Rakyat dapat menyajikan berita konflik yang lebih mendalam dan lebih mengarah pada jurnalisme damai.

Dalam hal pengungkapan kebenaran mengenai pihak – pihak yang bertikai, SKH Kedaulatan Rakyat peneliti sarankan agar lebih mengungkapkan kebenaran dari kedua belah pihak yang bertikai, bukan hanya mengungkapkan kebenaran di satu pihak saja. Pengungkapan kebenaran di kedua belah pihak sangat dibutuhkan untuk melihat masalah yang ada dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Selain itu peneliti juga menghimbau agar pada penelitian berikutnya, untuk melihat penerapan pada SKH Kedaulatan Rakyat dengan penelitian kualitatif. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian *framming*, dengan melakukan observasi atau wawancara dengan wartawan atau redaksi dari SKH Kedaulatan Rakyat untuk mengetahui sejauh mana ideologi SKH Kedaulatan Rakyat dalam melakukan pemberitaan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Emka, Zaenal Arifin. 2005. Wartawan juga bisa salah : Etika pers dalam terapan. Surabaya : Stikosa AWS, Ombudsman Jawa Pos Grup, JP Books.

Hasan Bin Mahmud Audah. 2006. *Ahmadiyah, kepercayaan-kepercayaan dan pengalaman-pengalaman*, Penerjemah. Dede A. Nasruddin, E. Muhaimin, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI).

Krippendorf, Klaus. 1991. *Analisis isi : Pengantar teori dan metodologi*. Jakarta : Rajawali.

Kriyantono, Rachmat. 2006. Tekhnik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2005. *Jurnalistik : Teori dan Praktik*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

McQuail, Dennis. 1996. *Teori Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.

Mahally, Abdul Halim. 2006. *Benarkah Ahmadiyah Sesat*. Jakarta : PT Cahaya Kirana Rajasa.

Muda, Dedy Iskandar. 2005. *Jurnalistik Televisi menjadi Reporter Profesional*. Bandung : PT. Remaja Rodakarya.

Nazir, Muhammad, 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Santana, Septian K. 2005. Jurnalisme Kontemporer. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Setriati, Eni. 2005. *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan: Strategi Wartawan Menghadapi Tugas Jurnalistik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Siahaan, H. M. 2001. Pers yang Gamang. Jakarta: Lembaga Studi Perubahan Sosial.

Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susan, Novri. 2009. *Sosiologi konflik dan isu – isu Konflik Kontemporer*. Jakarta : Kencana.

Zulkarnain, Iskandar. 2005. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan kedua. 1988. Balai Pustaka.

Sumber Tesis / Skripsi / Jurnal dan Tulisan Tidak Diterbitkan:

Akhmad, Fandy. 2009. *Hubungan Keberagaman Hidup dalam Konteks Toleransi Antara Jamaah Ahmadiyah dengan non Ahmadiyah di Desa Baciro D.I. Yogyakarta*. Fakultas Ushuluddin. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi.

Bharata, Bonaventura S, dkk. 2008. *Keistimewaan Yogyakarta DalamPandangan Surat Kabar (Analisis Isi Keistimewaan Yogyakarta Dalam Berita di SKH Kompas-Jogja, SKH Kedaulatan Rakyat, SKH Jawa Pos-Radar Yogya dan SKH Bernas Jogja*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian.

Hasrullah. 1996. *Pemberitaan Surat Kabar Tentang Konflik Internal PDI dan Terpilihnya Megawati (Studi Komunikasi Politik Terhadap Liputan Berita di Harian Kompas, Republika, dan Suara Karya)*. Magister Komunikasi. Universitas Indonesia. Thesis.

Leatemia, Rolly. 2011. Peranan Masyarakat Sipil Dalam Proses Reintegrasi di Daerah Paska Konflik : Studi Kasus Konflik Maluku. Unhan. Jurnal.

Karyadi. 2009. *Studi Komparatif Fatwa MUI dan Jaringan Islam Liberal Tentang Paham Jemaat Ahmadiyah Indonesia*. Fakultas Syari'ah. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi.

Puspawati, DP. Henny. 2004. *Framing Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang di Media (Analisis Framing Berita Harian Kompas dan Republika selama Pemberlakuan Darurat Militer* I *pada tanggal 18 Mei 2003 s/d 16 Nopember 2003 di Aceh)*. Magister Komunikasi. Universitas Indonesia. Thesis.

Subandini, Niniek Sri. 2001. *Pemberitaan Surat Kabar Terhadap Masalah Aceh (Analisa Isi terhadap Masalah Gerakan Aceh Merdeka Pada Harian Umum Waspada dan Harian Umum Kompas)*. Magister Komunikasi. Universitas Indonesia. Thesis.

Sumber Internet:

Artikel dalam internet :

Ali, Maulana Muhammad. "The Ahmadiyya Doctrines".(Akses 2 April 2011) dari *http://www.aaiil.org/text/books/mali/ahmadiyyadoctrine/ahmadiyyadoctrine.shtml*.

Rahardjo, Dawam. 2005. "Teror atas Ahmadiyah dan Problem Kebebasan Beragama."(Akses 19 Mei 2011) dari *http://islamlib.com/id/artikel/teror-atas-ahmadiyah-dan-problem-kebebasan-beragama.* diakses pada tanggal 19 Mei 2011.

Website :

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/05/07/12308/Pendukung-Ahmadiyah-Demo-di-Sekitar-Istana-. diakses pada 4 Agustus 2011.

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/03/12/139726/Ahmadiyah-Diserang-Empat-Rumah-Rusak-. Diakses pada 4 Agustus 2011.

http://www.antaranews.com/berita/245312/dpw-garda-bangsa-sulbar-kutuk-penyerangan-ahmadiyah. Diakses pada 5 September 2011.

Sumber lain :

SKH Kedaulatan Rakyat 7 Februari 2011 – 31 Maret 2011

Litbang Kedaulatan Rakyat, 2004

LAMPIRAN

Frequency Table

Tipe Liputan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Satu sisi	13	36.1	36.1	36.1
	Dua sisi	23	63.9	63.9	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Fokus Berita

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Fokus pada proses terjadinya konflik	29	80.6	80.6	80.6
	Fokus pada arena konflik	7	19.4	19.4	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Orientasi Liputan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mengungkap kebenaran di kedua belah pihak	13	36.1	36.1	36.1
	Mengungkap kebenaran di satu pihak	23	63.9	63.9	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Pandangan Terhadap Konflik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menyebut nama pelaku kejahatan di kedua belah pihak	2	5.6	5.6	5.6
	Menyebut nama pelaku kejahatan hanya di salah satu pihak	8	22.2	22.2	27.8
	Tidak menyebutkan sama sekali	26	72.2	72.2	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Pandangan Terhadap Akhir Konflik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mengangkat inisiatif perdamaian dan mencegah perang berlanjut	31	86.1	86.1	86.1
	Menyembunyikan inisiatif erdamaian sebelum kemenangan diraih	5	13.9	13.9	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

DATACODING SHEET

Nomor Berita	Judul	TGL	BLN	THN	Intrcdr	Tipe Liputan	Koding I	Koding II	Fokus Berita	Koding I	Koding II	Orientasi Liputan	Koding I	Koding II	Cara pandang thd konflik	Koding I	Koding II	Pandangan thd akhir konflik	Koding I	Koding II
1	Bentrok, tiga tewas dan belasan terluka	7	2	2011	1	b	1	1	a	1	1	a	1	1	c	0	0	a	1	1
					2	b			a			a			a			a		
					3	b			a			a			b			a		
2	SBY minta dilakukan investigasi	8	2	2011	1	a	1	1	a	1	1	b	0	1	c	1	1	a	1	1
					2	a			a			a			c			a		
					3	a			a			a			c			a		
3	Presiden minta ormas anarkis dibubarkan	10	2	2011	1	a	1	1	a	1	1	b	1	1	c	1	1	a	1	1
					2	a			a			b			c			a		
					3	a			a			b			c			a		
4	Belum ada putusan revisi	10	2	2011	1	a	0	1	a	1	1	b	0	1	b	1	1	a	1	1
					2	b			a			a			b			a		
					3	b			a			a			b			a		
5	Pelaksanaan SKB 3 Menteri dievaluasi	10	2	2011	1	a	1	1	a	1	1	b	0	1	c	1	1	a	1	1
					2	a			a			a			c			a		
					3	a			a			a			c			a		
6	Kerukunan umat beragama agar dijaga	11	2	2011	1	a	1	1	a	1	1	b	0	1	c	1	1	a	1	1
					2	a			a			a			c			a		
					3	a			a			a			c			a		
7	Penyerang markas Ahmadiyah Terkoordinasi	11	2	2011	1	a	0	0	a	1	1	b	1	1	c	1	1	a	1	1
					2	a			a			b			c			a		
					3	b			a			b			c			a		
8	Kapolda Banten-Kapolres Pandeglang dicopot	12	2	2011	1	b	1	0	a	1	1	a	1	1	c	1	0	a	1	1
					2	a			a			a			a			a		
					3	b			a			a			c			a		
9	Penting, kerukunan antarumat beragama	12	2	2011	1	a	1	1	a	1	1	b	0	1	c	1	1	a	1	1
					2	a			a			a			c			a		
					3	a			a			a			c			a		
10	Polres tingkatkan pengamanan tempat ibadah	14	2	2011	1	a	1	1	a	1	1	b	0	1	c	1	1	a	1	1
					2	a			a			a			c			a		
					3	a			a			a			c			a		
11	Jumlah tersangka terus bertambah	16	2	2011	1	b	1	0	a	1	1	b	1	1	b	1	1	a	1	0
					2	a			a			b			b			b		
					3	b			a			b			b			a		
12	Pemerintah belum tentukan sikap	17	2	2011	1	b	1	1	a	1	1	b	1	1	b	1	1	a	1	1
					2	b			a			b			b			a		
					3	b			a			b			b			a		

Nomor Berita	Judul	TGL	BLN	THN	Intrcdr	Tipe Liputan	Koding I	Koding II	Fokus Berita	Koding I	Koding II	Orientasi Liputan	Koding I	Koding II	Cara pandang thd konflik	Koding I	Koding II	Pandangan thd akhir konflik	Koding I	Koding II
13	Komunikasi hindari gesekan kekerasan	17	2	2011	1	b	1	1	a	1	1	b	1	0	c	1	1	a	1	1
					2	b			a			a			c			a		
					3	b			a			b			c			a		
14	Polisi tetapkan tersangka baru	18	2	2011	1	b	1	1	a	1	1	b	1	1	b	1	1	a	1	1
					2	b			a			b			b			a		
					3	b			a			b			b			a		
15	Muhammadiyah sudah tolak Ahmadiyah	22	2	2011	1	a	1	1	a	1	1	b	1	1	c	1	1	b	1	1
					2	a			a			b			c			b		
					3	a			a			b			c			b		
16	Kongres AS temui SBY	24	2	2011	1	a	0	0	a	1	1	b	1	0	c	1	1	a	1	1
					2	a			a			a			c			a		
					3	b			a			b			c			a		
17	Atho' Mudzhar : Pemerintah harus tegas	1	3	2011	1	b	1	0	a	1	1	b	1	0	b	1	1	a	1	1
					2	a			a			a			b			a		
					3	b			a			b			b			a		
18	Pelarangan Ahmadiyah tak perlu dipersoalkan	2	3	2011	1	b	1	0	a	1	0	b	1	1	c	1	1	a	1	1
					2	a			b			b			c			a		
					3	b			a			b			c			a		
19	DIY tak keluarkan SK soal Ahmadiyah	4	3	2011	1	a	1	0	a	1	1	a	1	1	a	1	1	a	1	1
					2	b			a			a			a			a		
					3	a			a			a			a			a		
20	Daerah melarang Ahmadiyah, tak masalah	6	3	2011	1	b	1	1	b	0	0	b	0	1	c	1	1	a	1	1
					2	b			b			a			c			a		
					3	b			a			a			c			a		
21	Konflik horisontal harus dicegah	7	3	2011	1	b	1	1	a	1	1	a	1	1	c	1	1	a	1	1
					2	b			a			a			c			a		
					3	b			a			a			c			a		
22	Mahfud : Pengaturan Ahmadiyan dilematis	9	3	2011	1	a	0	1	a	1	1	a	1	1	c	1	1	a	1	1
					2	b			a			a			c			a		
					3	b			a			a			c			a		
23	Mendagri : Atur Ahmadiyah, bukan bubarkan	10	3	2011	1	b	1	1	a	1	1	b	1	1	c	1	1	a	1	1
					2	b			a			b			c			a		
					3	b			a			b			c			a		
24	Massa FPI Datangi kantor Gubernur	10	3	2011	1	b	1	1	b	1	1	b	1	0	c	1	1	a	1	1
					2	b			b			a			c			a		
					3	b			b			b			c			a		

Nomor Berita	Judul	TGL	BLN	THN	Intrcdr	Tipe Liputan	Koding I	Koding II	Fokus Berita	Koding I	Koding II	Orientasi Liputan	Koding I	Koding II	Cara pandang thd konflik	Koding I	Koding II	Pandangan thd akhir konflik	Koding I	Koding II
25	Pemerintah kaji perda larangan	11	3	2011	1	a	0	1	a	0	1	b	1	0	c	1	1	a	1	1
					2	b			b			a			c			a		
					3	b			b			b			c			a		
26	Gubernur belum melangkah	11	3	2011	1	a	1	1	a	1	1	b	1	1	c	1	1	b	1	1
					2	a			a			b			c			b		
					3	a			a			b			c			b		
27	Sultan : Pembubaran Ahmadiyah wewenang pus	15	3	2011	1	b	1	1	a	1	1	b	1	1	c	1	1	a	1	1
					2	b			a			b			c			a		
					3	b			a			b			c			a		
28	TNI dituding dalangi "Operasi Sajadah"	16	3	2011	1	b	1	1	b	0	1	b	1	1	c	1	1	b	1	1
					2	b			a			b			c			b		
					3	b			a			b			c			b		
29	MA belum terima gaji materi	17	3	2011	1	b	1	1	b	0	1	b	0	0	c	1	1	a	1	1
					2	b			a			b			c			a		
					3	b			a			a			c			a		
30	Menag dukung pembubaran Ahmadiyah	20	3	2011	1	a	1	1	b	1	1	b	1	1	c	1	1	b	0	0
					2	a			b			b			c			b		
					3	a			b			b			c			a		
31	GPK Tolak Ahmadiyah	21	3	2011	1	a	1	1	b	1	1	b	1	1	c	1	1	b	1	1
					2	a			b			b			c			b		
					3	a			b			b			c			b		
32	Kiai Sahal : Ahmadiyah Sesat	22	3	2011	1	a	1	1	b	1	1	b	1	1	c	0	1	b	1	0
					2	a			b			b			b			a		
					3	a			b			b			b			b		
33	Diundang dialog, Ahmadiyah tak hadir	23	3	2011	1	b	1	1	b	1	1	b	1	1	c	0	1	a	1	0
					2	b			b			b			a			b		
					3	b			b			b			a			a		
34	Kemenag Bantah tudingan Ahmadiyah	24	3	2011	1	b	1	1	b	1	1	b	1	1	c	0	1	b	0	1
					2	b			b			b			b			a		
					3	b			b			b			b			a		
35	Pemkab perlu bentuk FKUB	29	3	2011	1	b	1	1	a	1	1	b	1	1	c	1	1	b	0	1
					2	b			a			b			c			a		
					3	b			a			b			c			a		
36	Beritakan info kebijakan soal Ahmadiyah	31	3	2011	1	a	1	1	a	1	1	b	1	1	c	1	1	a	1	1
					2	a			a			b			c			a		
					3	a			a			b			c			a		
		Total (M)					**31**	**29**		**32**	**34**		**28**	**30**		**32**	**34**		**33**	**32**

CODING SHEET

Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan Harian Kedaulatan Rakyat Mengenai Kasus Ahmadiyah

(Analisis Isi Berita Mengenai Jamaah Ahmadiyah Setelah Penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik)

Peneliti :
Nama Surat Kabar : Kedaulatan Rakyat
Judul Berita : _____
_____
Hari, Tanggal Terbit : _____
Nama Pengkoding :

1. **Tipe peliputan**
   a. Satu sisi
   b. Dua Sisi

2. **Fokus berita**
   a. Fokus pada proses terjadinya konflik
   b. Fokus pada arena konflik

3. **Orientasi liputan**
   a. Mengungkap kebenaran di kedua belah pihak
   b. Mengungkap kebenaran di satu pihak

4. **Cara pandang terhadap konflik**
   a. Menyebut nama pelaku kejahatan di kedua belah pihak
   b. Menyebut nama pelaku kejahatan hanya di salah satu pihak
   c. Tidak menyebutkan sama sekali

5. Pandangan terhadap akhir konflik

a Mengangkat inisiatif perdamaian

b Tidak mengangkat inisiatif perdamaian

(_____)

JAMAAH AHMADIYAH DISERBU WARGA

Bentrok, Tiga Tewas Belasan Terluka

BANTEN (KR) - Sedikitnya 3 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka akibat bentrokan warga Cikeusik Pandeglang Banten dengan jamaah Ahmadiyah, Minggu (6/2). Korban tewas dan luka kebanyakan mengalami luka bacokan di kepala, punggung, patah tulang dan pendarahan.

Dalam bentrokan tersebut, Ahmadiyah menegaskan 3 jamaahnya tewas yaitu Mulyadi, Tarno dan Roni. Mulyadi adalah warga setempat atau tuan rumah, sedangkan Roni adalah jamaah yang datang dari Jakarta. Sementara ada lima jamaah yang luka-luka. Mereka antara lain menderita luka bacok di kepala, patah tangan, luka bacok di punggung dan pendarahan di mulut dan hidung. Korban tewas dan luka kini berada di RS Malingping.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk aksi kekerasan tersebut. Menurut Ketua MUI Amidhan, pihaknya kini masih mengumpulkan data dan kesaksian warga, untuk mengetahui penyebab terjadinya insiden ini. "Pada prinsipnya kami masih mendalami masalah ini. Saya sudah menghubungi Ketua MUI Pandeglang untuk mencari tahu," ujarnya di Jakarta.

Dari informasi sementara yang dikumpulkan MUI, Amidhan menyebutkan jika serangan warga terhadap rumah jamaah Ahmadiyah karena dipicu oleh sekelompok jamaah Ahmadiyah yang lebih dulu menantang warga. "Saya kira ini bukan penyerangan, ini *fight back*. Warga marah karena ditantang oleh dua puluh orang warga Ahmadiyah, yang baru datang dengan 2 buah mobil," terangnya.

Karena itu, Amidhan meminta aparat penegak hukum harus segera turun tangan. Semua pelaku dari kedua pihak yang terlibat dalam bentrok itu harus ditindak tegas. "Aparat harus melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan. Mulai dari warga dan juga massa yang datang dengan 2 buah mobil itu," tegasnya.

Di tempat terpisah, cendekiawan muslim Ahmad Syafi'i Maarif terkejut atas

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Bentrok ..... Sambungan hal 1

bentrok yang menewaskan sejumlah jamaah Ahmadiyah tersebut. Ia mengimbau jamaah Ahmadiyah bersikap lebih terbuka terhadap masyarakat di sekelilingnya. "Eksklusivitas kelompok menjadi salah satu penyebab terjadinya ketegangan dan kesalahpahaman. Tapi betapa pun mereka eksklusif, tidak boleh ada tindakan kekerasan kepada mereka," ujarnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nusron Wahid, mengutuk penyerbuan warga Ahmadiyah. Menurutnya, tindakan warga yang menyerang jamaah Ahmadiyah ini tidak dapat ditolerir dan bagian dari pengingkaran hak-hak sipil warga negara Indonesia, dengan dalih dan alasan apapun.

(Sim/Edi)-f

BUNTUT INSIDEN DI CIKEUSIK PANDEGLANG

SBY Minta Dilakukan Investigasi

JAKARTA (KR) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan kepada aparat keamanan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengetahui sebab akibat terjadinya bentrokan antara komunitas Ahmadiyah dengan masyarakat di Cikeusik Pandeglang Banten, Minggu (6/2).

"Siapa yang lalai, salah, melanggar hukum harus diberikan sanksi. Termasuk manakala benturan itu sesungguhnya bisa dicegah, tetapi pencegahan tidak cukup efektif dilakukan baik oleh aparat keamanan maupun pemerintah daerah setempat, sanksi dan tindakan juga perlu dilakukan," tegas Presiden SBY saat menggelar jumpa pers di kantor presiden, Jakarta Senin (7/2) sore.

SBY juga ingin kesepakatan yang telah tercapai tahun 2008 agar ditepati sehingga konflik horizontal tidak terjadi lagi. "Saya juga minta jajaran pemerintah untuk melakukan investigasi, siapa yang tidak mentaati kesepakatan yang telah dicapai itu. Bila kesepakatan itu diindahkan dan dijalankan, benturan fisik yang tak diinginkan bisa dicegah," tegasnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menyesalkan terjadinya bentrokan tersebut. Seperti itu sebenarnya tidak perlu terjadi jika semua pihak bisa saling menghargai.

"Saya kira tidak perlu terjadi hal seperti itu," kata Raja Kraton Yogyakarta itu kepada wartawan di Kepatihan, Senin (7/2).

Sementara itu Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR Marwan Jafar mengutuk keras tindak kekerasan di Cikeusik Pandeglang. FKB menilai penyerbuan itu tidak bermoral, melanggar HAM dan mengingkari prinsip ajaran Islam yang damai.

Sedang Fraksi PDI Perjuangan DPR juga menilai pemerintah telah gagal melaksanakan amanat konstitusi, yaitu menjamin kebebasan warga negara memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

"Fraksi PDIP menuntut pemerintah bertanggungjawab atas kegagalan memberikan perlindungan kepada warga negara minoritas," kata anggota FPDIP Shelomita.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) juga menyesalkan aksi penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah. Sekjen PGI Gomar Gultom menyatakan, penyerangan yang menewaskan 3 jamaah Ahmadiyah itu sebagai tragedi kemanusiaan.

"Kita sangat berduka, ini merupakan tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Harga nyawa manusia dipermainkan," kata Gomar.

(Ast/Mgn/Edi/Ful/Sim/Imd)-b

POLRI MASIH ANGGAP ULAH ORKNUM

Presiden Minta Ormas Anarkis Dibubarkan

KUPANG (KR) - Kekerasan yang kembali muncul di Pandeglang dan Temanggung akibat ulah sekelompok organisasi masyarakat (ormas) membuat berang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kekerasan itu jika dibiarkan akan membuat Indonesia *setback* (kembali mundur) ke tahun 1999-2003, dimana terjadi kekerasan berbau SARA di beberapa daerah.

Oleh karena itu, Presiden meminta kepada para penegak hukum untuk mencari alasan hukum agar dapat membubarkan organisasi yang sering melakukan penyerangan. "Bila ada kelompok dan organisasi resmi yang selama ini terus melakuan aksi kekerasan, para penegak hukum perlu mencari jalan yang sah dan legal, bila perlu untuk pembubaran," tegas Presiden di hadapan peserta Hari Pers Nasional (HPN) di Gedung Eltari Kupang Nusa Tenggara Barat (NTT), Rabu (9/2).

Acara itu juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Gubernur NTT Frans Lubu Raya, Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono dan sejumlah gubernur. Hadir pula Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD.

Ditegaskan Presiden, tidak boleh ada ruang dan peluang bagi aksi kekerasan. Sehingga setiap potensi timbulnya kekerasan dan ketegangan sosial harus diredam dengan cara-cara sesuai norma hukum dan demokrasi secara tegas. "Meski dalam negara demokrasi kita junjung kebebasan berbicara dan berkumpul, tapi mari kita sadari, kita tidak boleh berikan ruang dan toleransi atas pidato dan seruan di depan publik untuk ajakan melakukan tindakan kekerasan dan bahkan pembunuhan pada pihak manapun," tandasnya.

Atas kejadian kekerasan yang terjadi, Presiden menegaskan agar Polri tidak segan serta berani mengungkap dan menangkap pelaku dan juga pimpinan aksi anarkis tersebut. Kalangan pers juga diminta untuk ikut membantu menciptakan kedamaian dan kerukunan masyarakat.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Presiden

Sambungan hal 1

Terpisah, Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, ormas dapat dibubarkan kalau dinilai melanggar ketertiban umum atau menerima bantuan asing yang menghasut untuk melakukan kerusuhan. Namun, untuk membubarkannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan

"Jadi, ada syarat tertentu dalam membubarkan ormas. Misalnya kalau melanggar pasal 13 Undang Undang Keormasan dan pasal 18 sampai 24 PP Nomor 18 Tahun 2006. Ini artinya memang bisa dibubarkan," tandas Mendagri usai menghadiri pertemuan di Kementerian Agama, Jakarta, kemarin.

Menurut Mendagri, sampai saat ini belum ditemukan ormas yang dianggap melanggar ketentuan perundangan sehingga harus dibubarkan. "Namun belum kami temukan. Yang jelas akan kami dalami fakta-fakta dulu," tandasnya.

Namun demikian, Menkum dan HAM Patrialis Akbar menegaskan, membubarkan ormas tersebut bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, tidak semua ormas mendaftarkan dirinya secara resmi. "Bagaimana kita membubarkan. Sebentar-sebentar LSM-nya berubah-ubah. Meski demikian ada sebagian yang membangun, ada juga yang sebagian memaki-maki, ada juga yang menjembatani," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Polri masih belum berniat membubarkan ormas yang melakukan tindakan anarkis. Alasannya, kejadian yang ada selama ini merupakan ulah oknum perorangan yang mengatasnamakan ormas tertentu. "Untuk membubarkan ormas itu ada ketentuan yang mengatur. Tapi, kalau perorangan saya kira tidak menyangkut organisasi. Jadi selama ini kan perorangan," kilahnya.

Dikatakan, dalam kejadian di Cikeusik maupun di Temanggung ada proses hukum yang dilanggar. Fakta-fakta menyebutkan adanya tindak kekerasan dan perusakan. **(Jon/Ioc/Ful/Edi/Imd)-b**

SOAL SKB TIGA MENTERI

Belum Ada Putusan Revisi

JAKARTA (KR) - Pertemuan antara Jaksa Agung Basrief Arief, Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyusul penyerangan jamaah Ahmadiyah, belum ada keputusan untuk merevisi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait Ahmadiyah.

Dalam pertemuan masing-masing pihak yang diundang hanya menyampaikan pandangannya. Selain itu juga dibahas mengenai penerapan SKB Tiga Menteri.

"Menyatukan pandangan berbagai instansi dalam rangka mencari penyelesaian jangka pendek maupun panjang secara permanen hal-hal yang berkaitan dengan Ahmadiyah. Jadi tadi baru brainstroming, sekarang sedang dirumuskan," kata Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta, Rabu (9/2).

Sementara itu terkait perkembangan kasus penyerangan jamaah Ahmadiyah, polisi resmi menahan satu dari dua tersangka pelaku penyerbuan. Salah satu tersangka yang sudah ditahan di Polres Pandeglang dengan barang bukti clurit dan tombak, adalah U. Sedangkan tersangka A alias K belum dilakukan penahanan karena bukti pendukungnya masih dikumpulkan. "Dari dua tersangka yang diperiksa, satu sudah ditingkatkan jadi penahanan, yakni yang berinisial U. Sedangkan A alias K akan dilengkapi alat buktinya," jelas Kabag Penum Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar.

(Imd/Edi/Ful)-f

Pelaksanaan SKB 3 Menteri Dievaluasi

YOGYA (KR) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang Ahmadiyah. SKB yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung pada 2008 itu diakui kurang sosialisasi, sehingga masih saja terjadi bentrok antara warga dengan jamaah Ahmadiyah.

"Jadi yang dievaluasi adalah pelaksanaan SKB tiga menteri. Sosialisasinya perlu dilihat kembali mengapa masih saja terjadi insiden seperti ini," kata Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri Tanri Bali kepada wartawan di Kepatihan, Rabu (9/2).

Selama ini, lanjutnya, sosialisasi memang sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun bisa jadi sosialisasi yang dilakukan pada saat SKB ditandatangani 3 tahun lalu tidak sampai ke tingkat bawah.

"Bisa jadi sosialisasi yang kita selenggarakan pada 2008 tidak sampai ke bawah. Atau ada pergantian pejabat. Makanya sosialisasi menjadi salah satu hal yang akan kita lihat kembali," tuturnya. SKB tiga menteri tersebut mengatur 6 hal tentang apa yang menjadi keharusan warga Ahmadiyah, masyarakat dan pemerintah.

Ditandaskan, dalam menangani tragedi Ahmadiyah di Pandeglang juga amuk massa di Temanggung, lanjutnya, pemerintah akan melakukan penegakan hukum. "Yang pasti adalah penegakan hukum. Bagi mereka yang bersalah tetap dihukum baik itu yang di Pandeglang maupun Temanggung," tandasnya.

(Ast)-a

Kerukunan Umat Beragama Agar Dijaga

WATES (KR) - Di Kabupaten Kulonprogo, berdasarkan pantauan tidak ada jamaah Ahmadiyah. Meski demikian perlu diwaspadai adanya dampak peristiwa di Banten dan Temanggung. Karena itu kerukunan umat beragama agar tetap terjalin dengan baik, koordinasi dengan pihak terkait dan masyarakat terus dibina. Kepada tokoh agama diharap memberikan pengertian kepada umatnya untuk selalu menjaga kerukunan, persatuan dan menciptakan suasana kondusif.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kulonprogo Drs H Noor Hamid MPdI ketika dikonfirmasi, Kamis (10/2). "Jamaah Ahmadiyah di Kulonprogo berdasarkan pantauan di lapangan memang tidak ada. Tetapi perlu adanya antisipasi dengan meningkatkan komunikasi/koordinasi antar umat beragama," kata Noor Hamid.

Peran tokoh agama, tambah Noor Hamid, melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) semakin dimantapkan dengan koordinasi rutin bulanan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas. **(Wid)-a**

DIWACANAKAN, SKB 3 MENTERI JADI UU

Penyerang Markas Ahmadiyah Terkoordinasi

JAKARTA (KR) - Mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk, DPR RI mewacanakan kenaikan status Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri menjadi Undang Undang (UU). Atas wacana ini, Menag Suryadharma Ali memberi apresiasi.

"Memang saya apresiasi kepada Komisi VIII untuk mengubah status SKB tersebut menjadi UU Kerukunan Umat Beragama. Menurut saya dengan UU tersebut kekuatan kerukunan beragama akan lebih kuat dari segi hukumnya," kata Suryadharma usai menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2).

Sebab, demikian mantan politikus Senayan itu, kalau pada akhirnya SKB tersebut berubah menjadi UU, maka pihak-pihak yang berwenang tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum, sehingga penuntasan kasus-kasus serupa menjadi lebih mudah.

"Kalau jadi UU bisa menjadi landasan hukum bagi pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak," tambahnya.

Terkait penyerangan markas Jamaah Ahmadiyah di Desa Cikeusik Pandeglang Banten polisi masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap identitas kelompok penyerang. Beberapa petunjuk yang mengindikasikan adanya pengerahan massa secara terkoordinasi hingga kini juga masih didalami. Dugaan ini bisa dikenali dari pita biru yang disematkan di baju atau dilingkarkan di bagian tubuh lain para pelaku penyerangan. Dari beberapa rekaman video amatir yang kini juga diperoleh Polri, identitas itu dengan jelas terlihat.

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam, sejauh ini pihak Polri belum berhasil mengidentifikasi kelompok penyerang. Pihaknya mengaku masih mencari bukti-bukti pendukung, termasuk memeriksa sedikitnya 25 orang saksi yang menguatkan untuk membuktikan dugaan adanya pengerahan massa terkoordinasi.

"Itu sedang didalami, nanti kita tunggu hasilnya. Dua orang yang dijadikan tersangka juga didalami," jelas Anton, di Mabes Polri Jakarta, Kamis (10/2).

Anton mengungkapkan, dalam melakukan penyelidikan Polri menggunakan video amatir yang merekam detik-detik penyerangan, termasuk tiga Jamaah Ahmadiyah yang disiksa di luar batas kemanusiaan. "Itu jadi bahan masukan Irwasum dan Bareskrim," jelasnya.

(Edi/Imd/Ful)-f

DUKUNGAN PEMBUBARAN ORMAS ANARKIS MENGUAT

Kapolda Banten-Kapolres Pandeglang Dicopot

JAKARTA (KR) - Buntut insiden penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang, Kapolda Banten Brigjen Pol Agus Kusnadi dan Kapolres Pandeglang AKBP Alex Sauzi dicopot.

Brigjen Agus digantikan Brigjen Putut Eko Bayuseno yang sebelumnya menjabat Wakapolda Metro Jaya. AKBP Alex dipindahtugaskan di bagian operasional Polri. Posisi Kapolres Pandeglang diisi AKBP Adi Suseno yang sebelumnya menjabat Kabag Analis Ditnarkoba Polda Banten.

Direktur Intelkam Polda Banten Kombes Adityawarman digantikan AKBP Sudaryanto yang sebelumnya menjadi Wadir Intelkam Polda Jambi. Adityawarman menjadi analis pendidik siswa.

Sementara itu dukungan kepada pemerintah agar bersikap tegas terhadap ormas pelaku kekerasan, terus bermunculan. Budayawan Mohammad Sobary termasuk yang secara terang-terangan menyambut baik Instruksi Presiden itu.

Tetapi Sobary melihat ketegasan sikap terkesan kurang bergaung setelah Menkum dan HAM, Patrialis Akbar mengatakan bahwa pembubaran ormas sulit dilakukan setelah presiden menyatakan komitmen tersebut secara terbuka di depan publik.

"Jangan begini. Presiden menganjurkan, tetapi menterinya melarang. Tak ada satu kata. Seharusnya dia menunjukkan bahwa presiden ngomong demikian, maka ini hukumnya. Atau kalau keberatan, dia datang ke istana baik-baik. Jangan presidennya didebat di depan publik seperti itu, kehilangan mukalah," katanya dalam diskusi perspektif di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (11/2).

PDI Perjuangan meminta pernyataan presiden soal pembubaran organisasi massa yang suka berbuat kekerasan direalisasikan. "PDI Perjuangan meminta agar segenap ormas anarki baik yang terdaftar atau tidak terdaftar segera dibubarkan dan dinyatakan sebagai ormas terlarang di Republik Indonesia," kata Hamka Haq di kantor DPP Jalan Lenteng Agung Jakarta.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida meminta Ahmadiyah dibubarkan agar bentrok tak terjadi lagi. Selanjutnya Ahmadiyah sebaiknya jadi agama baru.

"Ada SKB Tiga Menteri yang menyebutkan untuk menghentikan seluruh aktivitas Ahmadiyah, tapi di lapangan Ahmadiyah tetap *ngeyel* menyebarkan ajaran yang melenceng dari Islam. Pemerintah harus tegas saja, seperti Malaysia yang berani melarang terang-terangan," tegas Laode pada diskusi "Kasus Cikeusik, Harga Mahal Sebuah Keberagamaan" di gedung DPD Jakarta. **(Sim/Edi)-f**

Penting, Kerukunan Antarumat Beragama

KLATEN (KR) - Polres Klaten meningkatkan patroli untuk menekan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan mencegah terjadinya kerusuhan yang melibatkan massa. Selain itu, kepolisian juga meningkatkan silaturahmi dan kerja sama dengan para tokoh agama, untuk menjaga kerukunan antarumat beragama.

Kapolres Klaten AKBP Drs Agus Djaka Santosa saat dikonfirmasi, Jumat (11/2) mengemukakan, peningkatan patroli dilakukan menjaga stabilitas keamanan, bukan semata-mata spesifik terkait kerusuhan di Temnggung maupun kerusuhan SARA di daerah lain.

Kapolres mengemukakan, pihaknya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga suasana Klaten agar tetap kondusif. Antara lain juga melakukan pendataan kegiatan-kegiataan jamaah Ahmadiah di wilayahnya. Pihaknya juga melakukan kerja sama dengan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) dan tokoh-tokoh agama lain untuk melakukan sosialisasi pentingnya kerukunan antarumat beragama. **(Sit)-c**

Polres Tingkatkan Pengamanan Tempat Ibadah

WONOSARI (KR)- Kepolisian Gunungkidul meningkatkan pengamanan sejumlah tempat ibadah dan komunitas Ahmadiyah di Kecamatan Rongkop. Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, berkaitan dengan munculnya tindak kekerasan terhadap komunitas tersebut yang terjadi di Cikeusik, Pandeglang, Banten beberapa waktu lalu.

Kapolres Gunungkidul AKBP Asep Nalaludik SIK MSi kepada *KR* di Wonosari, Minggu (13/2) menyatakan, dampak kerusuhan dan tindakan kekerasan di Pandeglang memang belum terjadi di Gunungkidul. Tetapi tindakan antisipasi sudah dilakukan. "Dalam hal ini kepolisian telah bekerjasama dengan TNI, masyarakat, para tokoh antar agama juga instansi terkait agar tercipta situasi yang kondusif. Kami berharap di Gunungkidul tetap tercipta situasi yang kondusif dan masyarakat tidak terprovokasi tindakan anarkisme berbau SARA," ujarnya. **(Bmp)-a**

KASUS PENYERANGAN JAMAAH AHMADIYAH

Jumlah Tersangka Terus Bertambah

JAKARTA (KR) - Jumlah tersangka pelaku penyerangan markas Jamaah Ahmadiyah di Desa Cikeusik Pandeglang Banten terus bertambah. Berdasarkan bukti permulaan yang dimiliki, hingga kemarin sedikitnya sudah delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Total tersangka yang ditahan jadi tiga dari lima sebelumnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, penyidik masih memeriksa tiga tersangka lainnya di luar yang lima," ungkap Kabag Penum Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Selasa (15/2).

Lima orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka, masing-masing UJ, MHY, HE, KHM dan AY. "Tidak tertutup kemungkinan polisi akan menahan mereka semuanya, jika penyidik berkesimpulan alat buktinya cukup," imbuh Boy.

Selain menetapkan delapan tersangka, lanjut Boy, pihaknya juga tengah memburu dua tersangka lainnya yang saat akan dilakukan penangkapan berhasil melarikan diri. "Dua tersangka kabur. Saat mau ditangkap sudah tidak ada di rumahnya," ujarnya.

Terkait dengan identitas berupa pita biru yang digunakan para pelaku penyerangan, menurut Boy, hanya sebagai pembeda antara pelaku dengan warga Ahmadiyah di lokasi kejadian. "Penggunaan pita warna-warni oleh pelaku di rumah Ismail Suparman maksudnya agar dapat membedakan mereka dengan warga Ahmadiyah," jelasnya.

Sementara itu, pelaku kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik akan diperiksa Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM). Pasalnya, para pelaku kekerasan ini merupakan saksi penting untuk mengungkap kekerasan yang diduga ada rekayasa itu.

Menurut Komisioner Komnas HAM M Ridha Saleh, yang akan diperiksa pihaknya bukan hanya itu saja, tetapi mantan Kapolda Banten yang telah dimutasi pun akan diperiksa. Demikian halnya, Kapolres setempat dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan dipanggil.

Ridha membantah kalau Komnas HAM turun ke lapangan untuk

*** Bersambung hal 7 kol 3**

Jumlah . . . . . **Sambungan hal 1**

melakukan investigasi berdasar rekaman video. "Justru Komnas HAM mempertanyakan video itu bisa tersebar. Kalau Komnas HAM dibilang berpihak kepada satu pihak, saya kira tidak," kata Ridha di Jakarta, kemarin.

Terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, pihaknya telah membentuk Tim Pencari Fakta untuk menyelidiki kasus kekerasan atas Jamaah Ahmadiyah. Saat ini, tim masih mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti lapangan karena belum selesai dalam tugasnya. "Jadi, mereka masih melengkapi laporannya," kata Ketua MUI, Amidhan. **(Imd/Ful)-b**

TOKOH PENYERANG AHMADIYAH DIRINGKUS

Pemerintah Belum Tentukan Sikap

JAKARTA (KR) - Bareskrim Polri akhirnya berhasil menangkap dua orang yang diduga sebagai tokoh penggerak penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten. Keduanya diringkus dalam suatu penyergapan di daerah Bogor Jawa Barat, setelah sebelumnya namanya dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Kemarin pihak yang diamankan satu orang dan kebetulan ada pengikutnya satu lagi. Tapi masih kita lakukan pemeriksaan di Banten," ungkap Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi di Jakarta, Rabu (16/2).

Menurutnya, identitas kedua orang yang ditangkap di Bogor pada Selasa (15/2) malam itu, adalah U dan I. Mengenai apa peran keduanya dalam kasus penyerangan Jamaah Ahmadiyah tersebut, Ito enggan menjelaskannya. "Kami masih tunggu hasil pendalaman penyidik," kilahnya.

Menurut Ketua Dewan Pembina Tim Pembela Muslim (TPM) Pusat Mahendradatta, sosok U dikenal sebagai kiai di daerah Pandeglang Banten. Dari informasi yang diperolehnya, U ditangkap dengan sangkaan menyebarkan pesan singkat (SMS) kepada warga yang berisi hasutan. "Dalam SMS, Kiai U mengatasnamakan Gerakan Muslim Cikeusik (GMC)," ujarnya.

Sementara mengenai kelanjutan nasib Jamaah Ahmadiyah, pemerintah hingga saat ini masih belum memutuskan sikapnya. Usulan dari berbagai kalangan agar Ahmadiyah dijadikan sebagai agama baru, juga masih terus dikaji.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengakui, pihaknya banyak menerima saran dari berbagai kalangan untuk penyelesaian yang terbaik bagi Ahmadiyah. "Jadi sekali lagi sedang dikaji," katanya.

(Imd/Ful/Edi)-b

Komunikasi Hindari Gesekan Kekerasan

CILACAP (KR) - Maraknya aksi kekerasan yang berisukan agama dalam beberapa hari terakhir tidak lepas dari kurangnya komunikasi di antara berbagai pihak. Bila benih-benih aksi kekerasan tersebut dibiarkan, maka semuanya akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Kendati letupannya lebih dikarenakan masalah sepele. Karenanya, berkomunikasi untuk menghindari gesekan penyebab kekerasan, harus terus dilakukan.

"Sebenarnya hampir di semua daerah di Indonesia benih-benih aksi kekerasan yang melibatkan massa itu pasti ada, termasuk di Kabupaten Cilacap," ujar Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Cilacap Taufik Hidayatulloh, Rabu (16/2). Namun itu semua tinggal bagaimana upayanya agar hal itu tidak berkembang menjadi aksi kekerasan yang pada akhirnya merugikan semua pihak.

Menurutnya, masih terjadinya pergesekan dalam pendirian tempat ibadah di Cilacap merupakan salah satu bukti keberadaan benih-benih aksi kekerasan yang berisukan agama. Hanya saja, karena selama ini masalah tersebut masih bisa dikomunikasikan sehingga pergesekan itu tidak sampai menjadi aksi kekerasan yang melibatkan banyak massa.

"Selama ini FKUB Cilacap secara rutin sebulan dua kali melakukan pertemuan anggota untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kerukunan beragama di Cilacap," lanjutnya. Namun demikian, jika ada permasalahan yang mendesak, maka pertemuan itu bisa dilakukan seminggu dua kali. Sehingga segala permasalahan yang menyangkut kerukunan beragama itu bisa diselesaikan dengan baik.

Ahmadiyah

Menyangkut keberadaan Jamaah Ahmadiyah di Cilacap, Taufik mengatakan, jumlah Jamaah Ahmadiyah di Cilacap cukup banyak dan tersebar di sejumlah kecamatan. Hanya saja, karena tempat ibadahnya ada di Kecamatan Patimuan, sehingga secara formal jamaah Ahmadiyah lebih dikenal di Patimuan.

Kapolres Cilacap AKBP Rudi Darmoko membenarkan, ada dua kepala keluarga dengan delapan jiwa yang diketahui menjadi Jamaah Ahmadiyah di Patimuan, Cilacap. Di lokasi tersebut terdapat pula tempat ibadah yang menyerupai musala, yang menjadi pusat kegiatan ibadahnya. "Barangkali karena jamaah di daerah itu lebih terbuka, sehingga masyarakatnya lebih bisa menerima," katanya.

Di samping itu, kendati di daerahnya ada tempat ibadahnya, namun demikian Jamaah Ahmadiyah tersebut lebih banyak melakukan kegiatan ibadahnya di daerah Ciamis, Jawa Barat.

(Mak)-s

KASUS PENYERANGAN JAMAAH AHMADIYAH

Polisi Tetapkan Tersangka Baru

JAKARTA (KR) - Kepolisian dalam menangani kasus penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten bukan hanya menetapkan tersangka pada pihak pelaku (penyerang), namun juga menetapkan satu orang tersangka dari Jamaah Ahmadiyah atas terjadinya bentrokan tersebut.

"Satu orang dari Jamaah Ahmadiyah sudah menjadi tersangka dan berinisial D," kata Direktur I Tindak Pidana Umum (Tipidum) Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Pol Agung Sabar Santoso di Jakarta, Kamis (17/2).

Ia menjelaskan, D yang kini menjadi tersangka masih diperiksa dan menunggu waktu 1 X 24 jam untuk melakukan penahanan atau tidak. Tersangka ini, menjabat Kepala Keamanan Nasional Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Polisi sampai saat ini sudah memeriksa 10 orang dari Ahmadiyah. "Namun, baru 9 orang yang dimintai keterangan untuk dijadikan saksi," katanya.

Sementara itu untuk menghindari dari terulangnya aksi kekerasan yang melibatkan Jamaah Ahmadiyah, muncul usulan agar komunitas ini dipindahkan ke sebuah pulau terpencil. Tetapi DPR RI menolak wacana itu. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII dengan Jamaah Ahmadiyah yang berakhir hingga Kamis (17/2) dini hari, dicapai beberapa rumusan masalah.

Terhadap usulan 'relokasi' di pulau terpencil tersebut, Ketua Komisi Agama DPR RI Abdul Kadir Karding menegaskan pihaknya tidak pernah memiliki pertimbangan apapun untuk melakukan pengucilan. Yang pasti, Komisi VIII DPR masih terus mencari solusi terbaik bagi persoalan Ahmadiyah.

Komnas HAM dengan tegas juga menolak usulan pengucilan tersebut. "Tak bisa begitu, ada hak-hak orang untuk memilih, untuk bertempat tinggal. Itu hak asasi manusia," kata Komisioner Komnas HAM Nurkholis. **(Ful/Imd/Edi)-m**

SEJAK TAHUN 1933

Muhammadiyah Sudah Tolak Ahmadiyah

JAKARTA (KR) - Ketua Umum PP Muhammadiyah menegaskan bahwa Muhammadiyah sudah lama menolak ajaran Ahmadiyah. Sebab, ajaran Ahmadiyah tersebut menyimpang dari ajaran Islam.

"Sejak 1933, Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah mengeluarkan putusan (status di atas fatwa), bahwa sesuai akidah Islam, Muhammadiyah menolak ada pemahaman dan ajaran lain yang meyakini nabi baru selain Nabi Muhammad. Apapun dan siapapun yang melakukan," kata Din di Jakarta, Senin (21/2).

Menurut Din, putusan Muhammadiyah ini dikeluarkan lebih awal dan lebih keras dibanding fatwa Rabithoh Islamiyah pada tahun 1979. Juga lebih awal dari fatwa MUI yang dikeluarkan 1980 terkait keberadaan ajaran Ahmadiyah.

Namun, meski sudah mengeluarkan putusan menolak keberadaan Ahmadiyah sejak lama, Muhammadiyah enggan ikut dalam maraknya aksi gerakan pembubaran Ahmadiyah oleh sejumlah ormas akhir-akhir ini. **(Sim)-b**

DPR - KAPOLRI BAHAS KASUS CIKEUSIK

Kongres AS Temui SBY

JAKARTA (KR) - Delegasi anggota Kongres AS, Rabu (23/2) menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden Jakarta. Mereka membicarakan sejumlah topik antara lain meminta kejelasan informasi terkait dengan maraknya pemberitaan soal insiden Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten beberapa waktu lalu.

"Bapak Presiden telah jelaskan apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini yaitu mencari satu solusi yang tepat di mana melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 2008 ada semacam kesempatan untuk melakukan aktivitas bagi pemeluk Ahmadiyah dalam kondisi tertentu yang disepakati oleh komunitas beragama," ungkap Jubir Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah.

Menurut Teuku Faizasyah, delegasi Kongres AS mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah RI dalam menangani soal Ahmadiyah. "Ke depannya Bapak Presiden menegaskan bahwa mereka yang melakukan tindakan kekerasan akan melalui satu proses hukum yang sangat tegas dan hukum ditegakkan," beber Teuku.

Sementara itu Komisi VIII DPR kembali akan undang Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dalam rapat dengar pendapat umum terkait dengan permasalahan kerusuhan berlatar belakang agama di Cikeusik dan Temanggung. "Pekan depan kami akan undang Kapolri untuk melihat *progress report*-nya dan mempertanyakan penanganan kasus di Cikeusik dan Temanggung," kata Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding.

(Mgn/Edi/Sim/Ful/Imd)-b

TERHADAP KEBERADAAN AHMADIYAH

Atho' Mudzhar: Pemerintah Harus Tegas

JAKARTA (KR) - Pengajar UIN Syarif Hidayatullah Atho' Mudzhar menyatakan. pemerintah harus tegas terhadap penyebaran paham Ahmadiyah yang menciptakan polarisasi dalam masyarakat Islam dan melahirkan pertentangan dalam masyarakat.

"Menyebarkan paham itu, berarti ikut mendorong pertentangan, mengganggu ketertiban," tegas Atho' dalam diskusi "Ritus Kekerasan Berbasis Agama? Mengapa Terus Terjadi" di The Wahid Institute Jakarta, Senin (28/2).

Atho' yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama itu mengingatkan, negara harus memulihkan ketertiban masyarakat yang terganggu akibat penyebaran paham Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). "Pemerintah harus tegas," katanya lagi.

Sikap tegas yang dimaksud, pemerintah dapat membubarkan Ahmadiyah melalui jalur hukum, melalui pengadilan. "Banyak yang bilang tidak perlu pengaturan kebebasan beragama dalam segi hukum, saya kira ini yang salah. Pemerintah harus ambil *necessary step* (langkah penting). Dan itu bisa lewat undang-undang," bebernya lagi.

Mantan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu juga menyatakan, pemerintah dapat memperingatkan pengikut JAI terlebih dahulu untuk tidak menyebarkan pahamnya sebelum membubarkan JAI.

Sedang Direktur Eksekutif The Wahid Institute Yenny Wahid berpendapat, yang perlu dibahas dalam menyelesaikan ritus kekerasan berbasis agama bagaimana menyikapi masalah-masalah perbedaan teologis dalam masyarakat. Bukan hanya terkait kasus Ahmadiyah, namun berkaitan dengan pengikut aliran agama yang dianggap menyimpang lainnya, seperti aliran Lia Aminuddin atau Lia Eden.

Sementara itu Polri masih terus mengembangkan penyidikan kasus penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik. Jumlah tersangka pun terus bertambah, dan hingga saat ini sedikitnya sudah 12 orang yang ditahan karena diduga terlibat dalam aksi penyerangan tersebut. "Dua tersangka terakhir dengan dibantu tokoh Cibaliung telah menyerahkan diri, yaitu R dan D," jelas Kabag Penum Div Humas Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar.

(Edi/Mgn/Imd/Ful)-b

DAERAH TAK LANGGAR UNDANG-UNDANG

Pelarangan Ahmadiyah Tak Perlu Dipersoalkan

JAKARTA (KR) - Jaksa Agung Basrief Arief menilai, sikap pemerintah daerah mengeluarkan peraturan melarang keberadaan Ahmadiyah, sejalan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi masing-masing daerahnya.

"Beberapa daerah memang secara resmi mengeluarkan peraturan tersebut. Saya kira hal itu tidak bertentangan, itu sejalan," kata Basrief di Kantor Presiden, Selasa (1/3).

Senada, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan, aturan daerah tentang pelarangan Ahmadiyah tidak perlu dipersoalkan. "Itu kewenangan kepala daerah," katanya.

Menurut Patrialis, pelarangan Ahmadiyah sudah dilakukan sejak dulu. Peraturan Daerah tentang pelarangan Ahmadiyah juga dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau SKB Tiga Menteri. "Dalam SKB malah memberi peringatan keras terhadap Ahmadiyah. Dilarang menyebarkan," tegasnya.

Mendagri Gamawan Fauzi juga menegaskan bahwa aturan diberbagai daerah yang melarang Ahmadiyah itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

"Sepanjang itu dalam kerangka dan tidak bertentangan dengan UU, peraturan lebih tinggi, terutama UU No 1 Tahun 65, itu tidak masalah," katanya.

Bahkan Gamawan menganggap SK yang dikeluarkan Gubernur Jatim tersebut mendukung SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah. "Kalau memperkuat SKB itu lebih bagus kan. Kalau dalam rangka penguatan SKB, apa salahnya," ujarnya.

Sementara itu, ribuan orang dari Front Umat Islam (FUI) menggelar demo menuntut pembubaran Ahmadiyah di depan Istana Merdeka Jakarta.

Saat aksi berlangsung, Presiden SBY sedang memimpin rapat terbatas kabinet bidang Polhukam bersama sejumlah menteri. Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo yang ikut ratas menyatakan, sejauh aksi pengunjuk rasa itu berjalan tertib tidaklah masalah. "Silakan saja itu merupakan kebebasan berpendapat," tegas Timur.

Terpisah, Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding meminta agar gubernur di seluruh Indonesia tidak membuat peraturan sendiri-sendiri terkait dengan larangan Ahmadiyah.

(Mgn/Edi/Sim)-f

KASUS CIKEUSIK, JUMLAH TERSANGKA TERUS BERTAMBAH

DIY Tak Keluarkan SK Soal Ahmadiyah

BANTUL (KR) - Meski wilayah lain mengeluarkan SK mengenai pelarangan aktivitas Ahmadiyah, namun Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan tidak akan ikut-ikutan. DIY saat ini dinilainya aman dan memiliki toleransi yang cukup tinggi.

"Tidak perlu ada SK soal Ahmadiyah, yang terpenting kita jangan terprovokasi maka tetap aman. Daerah yang mengeluarkan SK soal Ahmadiyah adalah sebagai langkah antisipasi terhadap segala kemungkinan," ujar Gubernur di Pantai Pandansimo Baru Poncosari Srandakan, Kamis (3/3).

Langkah serupa diikuti Bupati Bantul Hj Sri Suryawidati yang memilih mengedepankan pendekatan komunikasi. Komitmen dari semua masyarakat untuk toleransi dan saling menghargai adalah hal yang terpenting. "Dari Muspida dan pemuka agama sudah bertemu bahwa akan ada sosialisasi kepada umat untuk tetap menjaga iklim kondusif," jelasnya.

Sementara itu untuk perkembangan kasus penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik Banten, Polri akhirnya menetapkan Deden Sujana, seorang anggota Jamaah Ahmadiyah yang menjadi korban penyerangan sebagai tersangka. Warga Bekasi yang sengaja datang ke Cikeusik Pandeglang Banten ini, dijerat Pasal 160 dan Pasal 212 KUHP tentang penghasutan dan upaya perlawanan terhadap petugas.

Penetapan Deden sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh keterangan sejumlah saksi mengenai keterlibatannya. Namun, untuk saat ini pemeriksaan dan penahanan terhadap dirinya belum dilakukan, karena Deden masih terbaring di rumah sakit akibat luka yang dideritanya. "Jika yang bersangkutan telah sembuh total, pemeriksaan akan dituntaskan," jelas Kabag Penerangan Umum Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, kemarin.

Boy mengungkapkan, Deden merupakan satu dari 17 anggota Ahmadiyah yang datang dari Jakarta ke rumah Ismail Suparman di Cikeusik. Deden sendiri terluka parah dalam bentrokan tersebut.

Sementara itu Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi mengungkapkan peran tersangka Endang Binuangeun dalam insiden Cikeusik. Menurutnya, Endang merupakan orang yang menyebarkan pesan singkat yang berisikan ajakan membubarkan Ahmadiyah dengan memakai pita biru. "Yang bersangkutan sudah ditahan," ungkap Ito. **(*-7/Imd/Edi)-a**

MENTERI AGAMA SURYADHARMA ALI:

Daerah Melarang Ahmadiyah, Tak Masalah

SLEMAN (KR) - Menteri Agama Suryadharma Ali, tidak mempermasalahkan pelarangan ajaran Ahmadiyah di sejumlah daerah di Indonesia, asal tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kepala daerah mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan disesuaikan dengan situasi yang ada saat itu. Sehingga dia tidak mempermasalahkan ketika ada daerah yang melarang aktivitas Ahmadiyah.

Menag menyatakan hal itu saat menghadiri Upacara Tawur Agung Kesange di pelataran Candi Prambanan Sleman Yogyakarta, Jumat (4/3).

Senada dengan Menag, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah soal Ahmadiyah.

"Sudah jelas akidah Ahmadiyah bertentangan dengan akidah Islam, dan itu tidak bisa diterima umat Islam. Intinya sudah tidak bisa diperdebatkan," ujar Din usai mengikuti seminar internasional 'Islam, Peace, and Justice' di Jakarta, Sabtu (5/3). Ditegaskan, jika peraturan itu dikatakan melanggar Hak Asasi Manusia, apa yang dilakukan Ahmadiyah juga sebaliknya, karena mengkafirkan umat Islam yang tidak mempercayai Mirza Ghulam Ahmad. "Memang masalah HAM selalu dijadikan celah untuk keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Untuk itu perlu ketegasan dari pemerintah mengenai keberadaan Ahmadiyah, sehingga tidak berlarut-larut. Kalau pemerintah masih saja tidak tegas, akan mengundang reaksi dan kontroversi di masyarakat, khususnya umat Islam. Itu juga berpotensi menimbulkan pertikaian dan kekerasan," tuturnya.

Sedangkan Rais Suriah PWNU Jateng KH Masruri Mughni dan Ketua Tanfidziyah Drs HM Adnan MA sebagai pengendali NU Jateng, menolak maraknya pembuatan Pergub maupun Perda tentang pelarangan Ahmadiyah.

Drs HM Adnan MA menegaskan, PWNU Jateng berusaha mendudukkan persoalan produk hukum pada prosedur yang semestinya dan produk hukum yang terkait masalah keagamaan, ranahnya ada di pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. "Gerakan membuat perda dalam mensikapi aktivitas jamaah Ahmadiyah justru sudah memosisikan Indonesia sebagai negara federasi, bukan lagi NKRI", katanya.

Terkait hal ini Menag menyatakan, di Kementerian Agama (Kemenag) tidak ada posisi untuk menyatakan suatu aliran itu sesat atau tidak. Selain itu Kemenag juga tidak berkompetensi untuk melarang, membekukan atau mencabut suatu organisasi atau ajaran, Termasuk soal Ahmadiyah. "Sikap Kemenag bisa dilihat dari isi SKB 3 Menteri tersebut", tegas Menag. **(R-6/Sim/Isi)-f**

SOAL LARANGAN AJARAN AHMADIYAH

Konflik Horisontal Harus Dicegah

JAKARTA (KR) - Setelah reda berseteru dengan beberapa media elektronik dan cetak, Sekretaris Kabinet (Seskab), Dipo Alam, kembali 'bersuara keras'. Kali ini ditujukan kepada para tokoh agama yang dinilainya melakukan manuver politik dengan 'memainkan' isu kasus Ahmadiyah.

"Jangan mempolitisasi dan memperkeruh keadaan, karena hal ini berpotensi melebar ke arah konflik horisontal," katanya di Jakarta, Minggu (6/3). Pernyataan Dipo tersebut sekaligus mengomentari pernyataan Din Syamsuddin yang mendesak ketegasan Pemerintah Pusat soal larangan Ahmadiyah.

Dipo meminta tokoh lintas agama, seperti Din Syamsuddin dan Romo Benny Susetyo, tidak memainkan kartu kontroversi Ahmadiyah karena bisa melebar ke arah konflik horisontal. Tentang adanya sejumlah pemerintah daerah yang melarang kegiatan Ahmadiyah, Din Syamsuddin mendesak ketegasan pemerintah pusat soal larangan tersebut. "Desakan Din Syamsuddin ke pemerintah pusat salah alamat," kata Dipo. Oleh karena itu, menurutnya, dari awal pemerintah sudah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri untuk pengaturannya dan tinggal masyarakat di daerah menjalankan dan konsekuen mematuhi kesepakatan tersebut.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS), KH Hasyim Muzadi menegaskan, penyebaran ajaran Ahmadiyah harus segera dihentikan. "Ajaran ini sangat rawan memicu terjadinya kemarahan masyarakat, termasuk politisasi dari pihak-pihak tertentu yang ingin mendompleng isu ini sehingga makin memperkeruh suasana," kata Hasyim Muzadi.

Front Pembela Islam (FPI) DIY-Jateng juga menolak keberadaan aliran Ahmadiyah di Yogya. Untuk itu, FPI mendesak Gubernur DIY melarang aliran Ahmadiyah berada di Yogya, seperti yang sudah dilakukan beberapa daerah lain.

Ketua FPI DIY-Jateng Bambang Tedy SH kepada wartawan di markas FPI, Minggu mengatakan, FPI menghormati toleransi dan perbedaan agama. Selama ini FPI juga tidak mempermasalahkan berbagai umat beragama hidup berdampingan. Namun pihaknya menolak penodaan terhadap agama Islam. "Menurut kami aliran Ahmadiyah telah menodai ajaran Islam. Untuk itu kami menolak keberadaan mereka di Yogya," kata Bambang.

(Sim/Mgn/Ful/Imd/Edi/R-4)-b

PEMBUBARAN HARUS MELALUI PENGADILAN

Mahfud: Pengaturan Ahmadiyah Dilematis

JAKARTA (KR) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Mahfud MD berpendapat, pelarangan Ahmadiyah serba dilematis untuk dilakukan. Menurutnya, pembubaran Ahmadiyah bukan solusi terbaik dan sulit dilakukan. Organisasi bisa saja bubar. Namun penganut dan keyakinan akan tetap ada dan tidak akan pernah bisa dipaksa oleh kekuatan apapun.

"Kalau saya lebih suka menggunakan dalil Alm Gus Dur. Orang itu ndak usah membela Tuhan, karena Tuhan ndak perlu dibela. Tuhan itu bisa bela dirinya sendiri kok. Kalau memang Ahmadiyah itu salah biar Tuhan yang menghakimi. Artinya kita secara fisik di dalam berbangsa dan bernegara tidak boleh," kata Prof Mahfud kepada wartawan di gedung MK Jakarta, Selasa (8/3).

Sebab itulah, Mahfud kembali menegaskan agar yang diadili pemerintah adalah tindakan. Kalau tindakan itu dianggap melanggar hukum, ya, silakan pemerintah proses. Tindakan seseorang menghakimi orang, kata dia, jelas melanggar hukum. Karena itu negara harus hadir dan proaktif.

"Menurut saya penyelesaiannya ada pada hukum, dan ketegasan negara. Karena kalau diambang-ambangkan terus tidak akan selesai," tegasnya.

Untuk itu Mahfud mengimbau setiap kelompok masya--rakat agar tidak melakukan kekerasan atas nama agama karena negara menjamin hak setiap warga melaksanakan keyakinannya secara merdeka tanpa ada paksaan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun.

Secara terpisah KH Solahuddin Wahid mengatakan, jika Ahmadiyah dianggap menyesatkan dan mengganggu ketertiban sosial, harus dibawa ke pengadilan. Penyelesaiannya bukan dengan kekerasan. Menurutnya, organisasi apapun, jika dibubarkan karena tekanan kelompok yang lebih besar, itu tidak sehat.

"Kalau dibubarkan ya harus melalui produk hukum, melalui proses peradilan. Nanti kita lihat apakah betul Ahmadiyah menodai agama, apakah betul dia dapat dibubarkan," katanya. **(Ati/Edi)-b**

TOLAK IMBAU GUBERNUR KELUARKAN PERGUB

Mendagri: Atur Ahmadiyah, Bukan Bubarkan

JAKARTA (KR) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menolak untuk mengimbau para gubernur mengeluarkan peraturan pelarangan aktivitas Ahmadiyah. Para gubernur hanya diminta mengatur aktivitas Ahmadiyah sesuai isi SKB 3 Menteri, namun bukan membubarkan.

"Saya tidak mengimbau, tapi saya minta ya silakan saja diatur karena memang isi SKB seperti itu, bukan membubarkan," ujar Mendagri di Bandung, Rabu (9/3).

Menurut Mendagri, pelarangan Ahmadiyah tidak melanggar konstitusi. Seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat melalui Pergub No 12/2011 tentang Pelarangan Aktifitas Ahmadiyah, tidak melanggar konstitusi. "Tidak ada yang salah. Memang itu isi dari SKB Tiga Menteri tapi lebih dikonkretkan lagi oleh Jawa Barat," jelasnya.

Oleh karena itu, Mendagri mendukung dikeluarkannya Peraturan Gubernur tersebut. "Ada tiga fakta Pergub tentang Pelarangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah tersebut yang merupakan turunan dari SKB Tiga Menteri. Pertama aspek pembinaan, kedua pelarangan untuk menyebarkan ajaran Ahmadiyah dan ketiga pengawasan," ungkapnya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mendukung pembentukan perda pelarangan Ahmadiyah. Perda yang telah diberlakukan di beberapa daerah tersebut merupakan salah satu alternatif untuk menghindari konflik horizontal sesama warga negara. "Perda ini secara hemat saya bisa menjadi jalan keluar meski tidak bisa memuaskan semua pihak," ujarnya di gedung DPR Jakarta.

Din berharap perda tersebut efektif menjadi alat untuk menegakkan ketertiban sosial. "Karena kasus Ahmadiyah sudah merusak ketertiban sosial, perda memiliki kewenangan selama ada dasar," katanya.

Sementara itu, Solidaritas Perempuan (SP) mendesak pemerintah mencabut SKB Tiga Menteri No 3/2008. "Kami meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut semua peraturan atau kebijakan yang mendiskriminasikan dan mengkriminalisasi perempuan, termasuk SKB Tiga Menteri," ujar Risma Umar, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan dalam rangka kampanye Gerakan Anti Diskriminasi (Gadis) di Pejaten Jakarta Selatan, kemarin.

Solidaritas Perempuan meminta kepada pemerintah untuk memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) memenuhi unsur pemenuhan hak-hak konstitusi perempuan dan kelompok minoritas. Selain itu, pemerintah diminta untuk berhenti memproduksi peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan.

(Ati/Edi)-f

TERKAIT AHMADIYAH

Massa FPI Datangi Kantor Gubernur

YOGYA (KR) - Seratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) DIY-Jateng datangi kantor Gubernur DIY di Kepatihan, Rabu (9/3). Mereka meminta agar Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengeluarkan pernyataan pembubaran Ahmadiyah. Perwakilan massa FPI pada kesempatan itu ditemui oleh Kepala Badan Kesbanglinmas DIY Murprih Antoro Nugroho, Kepala Satpol PP DIY Sukamto dan Kepala Kantor Kementerian Agama DIY Maskul Haji.

Massa FPI datang menggunakan sepeda motor dan mobil. Massa melakukan orasi sekitar satu jam di depan Masjid Sultoni Kepatihan. Aksi demo yang mendapat penjagaan ketat petugas keamanan itu berjalan tertib dan lancar.

Pada kesempatan tersebut FPI menyampaikan surat pernyataan sikap FPI dan ormas Islam se-Yogya. Surat yang ditandatangani Ketua DPD FPI DIY Jateng H Muhammad Bambang Tedi SH antara lain berisi Yogya menghormati perbedaan agama, tapi menolak penodaan agama. Semua agama boleh hidup berdampingan secara damai di Yogya, namun bagi penodaan agama tidak ada tempatnya. FPI juga minta pada gubernur agar melarang Ahmadiyah di Yogya untuk melindungi HAM umat Islam.

"Kami hanya menyampaikan surat pernyataan dan pemprov menyatakan akan mempelajari. Selanjutnya akan memberi jawaban secepatnya," kata Bambang Tedi.

KR-Effy Widjono Putro

FPI saat berorasi di Kepatihan.

FPI lanjutnya, akan terus melakukan desakan hingga ada pernyataan larangan secara resmi dari pemerintah tentang Ahmadiyah.

Usai menerima perwakilan massa FPI Murprih mengatakan, sikap pemerintah saat ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada. "Sikap kami ya tetap menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada, yakni SKB 3 Menteri," katanya. Pemerintah daerah tidak boleh menyimpang dari aturan yang ada. **(Ast)-f**

SOAL AHMADIYAH

Pemerintah Kaji Perda Larangan

JAKARTA (KR) - Pemerintah tengah mengkaji larangan ajaran Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh beberapa daerah seperti Kota Bogor, Pemda Jabar, Banten, Banjar Baru dan beberapa daerah yang lain. Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan tersebut perlu dikaji ulang apakah inkonstitusional atau tidak.

"Ini baru pertemuan ronde pertama, masih ada pertemuan berikutnya. Kita tidak bisa ambil sikap buru-buru," kata Menko Kesra H R Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/3).

Agung meminta dalam kerukunan umat beragama ini tidak terjadi tindakan anarkisme lagi seperti yang terjadi terhadap Ahmadiyah di Cikeusik, juga perusakan gereja di Temanggung. Hal ini sebagai masukan dari Kantor Menko Kesra dalam rangka mencari jalan keluar.

Beberapa opsi tentang Ahmadiyah juga dipertimbangkan sebagai masukan. Mestinya tidak boleh dibiarkan berlarut, tidak ada masalah baru, segala aspek dalam menjaga NKRI.

Agung juga mengatakan pemerintah daerah yang mengeluarkan larangan tentang Ahmadiyah itu tidak melanggar SKB Menteri Agama, Mendagri dan Kejaksaan Agung, karena salah satu isi SKB melarang kegiatan Ahmadiyah.

Sedangkan pengurus PBNU Slamet Effendi Yusuf meminta pemerintah secara sungguh-sungguh dan jernih untuk menciptakan solusi bagi konflik bernuansa agama. Latar belakangnya harus dilihat secara komprehensip.

(Ati/Edi)-f

SOAL AHMADIYAH DI JAWA TENGAH

Gubernur Belum Melangkah

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng H Bibit Waluyo, tidak akan mengambil kebijakan apa pun soal Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sebelum konsultasi dengan pemerintah pusat. Soal agama sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu Pemprov Jateng harus melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan. Gubernur mengatakan hal ini kepada wartawan di Semarang, Kamis (10/3).

Sehari sebelumnya, gubernur mengumpulkan semua pejabat Muspida Jateng untuk dimintai masukan. Pertemuan yang dikemas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Muspida plus tersebut, hadir di antaranya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng Chairuddin Idrus, Kepala Kejaksaan Tinggi Widyapramono, Wakapolda Jateng Brigjen Sabar, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Langgeng Sulistyono, pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama, Badan Intelijen Nasional, serta dari MUI Jateng. Dari hasil pertemuan tersebut disimpulkan Pemprov harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat sebelum melangkah untuk mengambil kebijakan terkait dengan JAI.

"Saya sudah meminta masukan dari pejabat Muspida Jateng plus MUI. MUI sudah tegas memfatwakan JAI sebagai organisasi keagamaan yang sesat dan menyesatkan, sehingga harus dibubarkan. Namun soal agama sebenarnya merupakan ranah kewenangan pemerintah pusat. Sehingga tepat jika pejabat Muspida menyarankan gubernur untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat," tutur Bibit Waluyo.

Karena kesimpulan Rakor, gubernur harus melakukan konsultasi terlebih dulu ke pemerintah pusat, sehingga Rakor Muspida plus belum mengambil keputusan untuk melarang atau membekukan aktivitas JAI di Jateng. Diakui masalah JAI menyangkut akhidah, sehingga filternya ada di lembaga MUI.

Dengan adanya fatwa MUI sebanyak dua kali, yaitu pada 2005 dan 2008 yang menyatakan Ahmadiyah sesat dan menyesatkan, memang harus ada tindaklanjutnya. Apalagi MUI juga telah mendesak agar pemerintah segera melakukan pelarangan segala kegiatan yang dilakukan JAI. **(Bdl)-o**

MM MINTA DIFASILITASI DISKUSI PUBLIK

Sultan: Pembubaran Ahmadiyah Wewenang Pusat

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menandaskan, pemerintah daerah (pemda) tidak punya wewenang membubarkan Ahmadiyah. Kebijakan tersebut menjadi porsi pemerintah pusat. Yang terpenting dilakukan daerah adalah melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang ditetapkan sejak Juni 2008.

"Saya *kan* sudah bilang pemda tidak punya hak membubarkan, itu wewenang pemerintah pusat. Itu saja. Yang penting kita mengendalikan dengan melaksanakan SKB bagi Ahmadiyah. Kita bisanya hanya melaksanakan SKB," tandas gubernur kepada wartawan di Kepatihan, Senin (14/3).

Majelis Mujahidin (MM) kemarin juga melakukan audiensi dengan jajaran pemprov DIY untuk menolak sikap pemprov yang dinilai toleran terhadap keberadaan Ahmadiyah. MM juga meminta agar pemprov bersedia memfasilitasi diskusi publik secara terbuka. "Kita beri kesempatan seluas-luasnya bagi Ahmadiyah untuk membela diri. Kita menyiapkan diri untuk melakukan debat publik dengan difasilitasi pemprov," kata Sekjen MM Shobarin Syakur.

Dia mencontohkan, melalui dialog yang baik pula Ahmadiyah Karanganyar dengan penuh kesadaran menyatakan membekukan diri (tidak lagi beraktivitas).

"Ini sangat baik. Jadi kita tetap memberikan porsi agar tidak dianggap melanggar HAM. Mereka berhak mengemukakan argumentasi dalam debat publik secara ilmiah dan logis. Kalau terbukti seperti Ahmad Musadek ya bisa saja dilarang," ujarnya.

Shobarin menilai, selama ini pemerintah masih gamang untuk membubarkan Ahmadiyah karena khawatir dianggap melanggar HAM. Secara undang-undang porsi penutupan sebagai tindak lanjut dari SKB adalah hak dari pemda. Eksekutif hendaknya dapat melaksanakan SKB tersebut dengan baik dan penutupan dinilainya sebagai langkah untuk mengamankan SKB.

Menanggapi pernyataan dari MM, Asisten Administrasi Umum Pemprov DIY Sigit Sapto Raharjo mengatakan, pemprov sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mensikapi SKB tiga menteri. Semua aspirasi dari berbagai pihak tentang Ahmadiyah akan ditampung, sehingga nantinya bisa ditarik kesimpulan. "Selama ini juga sudah banyak pernyataan yang disampaikan sejumlah elemen masyarakat soal Ahmadiyah," katanya. **(Ast)-a**

ISLAMISASI WARGA AHMADIYAH

TNI Dituding Dalangi 'Operasi Sajadah'

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengungkapkan adanya kegiatan TNI yang berupaya mengajak warga Ahmadiyah kembali ke Islam. Komisi I DPR juga memperoleh laporan kegiatan yang diduga melibatkan 56 Komando Rayon Militer (Koramil) di bawah Kodam Siliwangi Jabar.

Menurut Hasanuddin, anggota TNI masuk ke desa-desa di 56 Koramil yang berada di wilayah Jabar. "Babinsa mendata anggota Ahmadiyah dan ini menimbulkan ketakutan," tegas Hasan di Komisi I DPR, Selasa (15/3).

Dalam kaitan itu Komisi I pun akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Panglima TNI untuk klarifikasi laporan yang baru diterima ini. "Besok akan kami pertanyakan," bebernya.

Sebelumnya Wakil Direktur Eksekutif Human Rights Work Group Choirul Anam menduga pihak TNI melanggar UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Alasannya, TNI terlibat dalam tindakan pelarangan aktivitas Ahmadiyah pasca terbitnya Perda pelarangan Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat.

Ketua MPR Taufiq Kiemas menyayangkan adanya anggota TNI yang mengintervensi aktivitas Ahmadiyah di sejumlah wilayah. Seharusnya TNI bersikap netral kepada semua kalangan. "Kalau terjadi seperti itu kita sungguh menyayangkan," tegasnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Polkam Djoko Suyanto menegaskan bahwa Panglima Kodam di masing-masing daerah tidak pernah melarang seseorang menganut kepercayaan tertentu.

"Pemerintah tidak berhak membungkam atau melarang kepercayaan seseorang warga negara. Untuk itu, kabar adanya 'Operasi Sajadah' untuk mengislamkan warga Ahmadiyah sebaiknya dicek langsung di lapangan," ujarnya. **(Edi/Mgn/Sim)-e**

PERDA LARANGAN KEGIATAN AHMADIYAH

MA Belum Terima Uji Materi

JAKARTA (KR) - Mahkamah Agung (MA) sampai saat ini belum menerima *judicial review* (uji materi) mengenai Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan kegiatan Ahmadiyah di berbagai daerah. Namun demikian, Ketua MA Harifin A Tumpa mempersilakan jika ada pihak-pihak yang merasa Perda Ahmadiyah itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

"Yang pasti kami belum menerima itu (uji materi) Perda Ahmadiyah," kata Harifin kepada wartawan usai penutupan Konferensi Internasional 'Association Court Administration (IACA)' di Jakarta, Rabu (16/3). Sebelumnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengaku sudah menyiapkan langkah hukum di antaranya melakukan *judicial review* atas Perda yang diterbitkan untuk melarang Ahmadiyah. Menurut Ketua YLBHI Erna Ratnaningsih, pihaknya meminta agar segala peraturan yang mengekang kebebasan beragama dan berkeyakinan segera dicabut atas nama hukum.

Beberapa daerah yang melarang kegiatan Ahmadiyah dengan Perda, di antaranya Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Banten dan beberapa daerah lainnya. Atas terbitnya Perda tersebut, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan hal ini tidak masalah sepanjang Perda tersebut sejalan dengan Surat Keputusan Bersama tiga Menteri. **(Ful/Imd/Edi)-b**

LUSA FASILITASI DIALOG

Menag Dukung Pembubaran Ahmadiyah

YOGYA (KR) - H Suryadharma Ali MSi menyatakan secara pribadi mendukung pembubaran Ahmadiyah. Namun ia menegaskan Kementerian Agama (Kemenag) tidak memiliki otoritas untuk membubarkan organisasi yang dicap sesat itu.

"Dari sisi organisasi, kewenangan membubarkan Ahmadiyah di tangan Mendagri, dari sisi pencabutan badan hukum adalah kewenangan Menteri Hukum dan HAM, lalu dari sisi ajaran adalah Jaksa Agung," katanya saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) VI DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DIY di Asrama Haji Yogyakarta, Sabtu (19/3).

Menurut Suryadharma, Kemenag hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada ketiga institusi yang punya otoritas membubarkan Ahmadiyah. Kemenag juga tidak mempunyai otoritas untuk menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan organisasi sesat atau tidak, karena hal itu merupakan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). "MUI yang melakukan kajian dan mengambil keputusan bahwa Ahmadiyah bukan Islam, sesat dan supaya dibubarkan," kata Ketua Umum DPP PPP ini.

Menag mengungkapkan, pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi pembubaran Ahmadiyah. Kemenag ingin menyelesaikan polemik dengan menyerap pandangan dari berbagai pihak terkait, baik pro maupun kontra, melalui dialog yang rencananya digelar pada 22 Maret di Jakarta. Dialog akan melibatkan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), MUI, ormas Islam, ahli hukum, pegiat HAM serta ahli tentang Ahmadiyah.

"Kita fasilitasi dialog untuk menangkap semua pemikiran. Semua pihak dipersilakan bicara, baik dua aliran Ahmadiyah, pihak yang mendukung maupun menolak pembubaran Ahmadiyah. Semuanya akan kita gali, kemudian dijadikan dasar dalam memberi rekomendasi," tuturnya.

Menag menambahkan, baik opsi Ahmadiyah dibiarkan maupun dibubarkan, keduanya tidak menyelesaikan masalah. Namun ia secara pribadi mendukung pembubaran Ahmadiyah, karena kalau dibiarkan berarti memelihara masalah yang akan terakumulasi dan akhirnya meledak lebih dahsyat.

"Kalau dibubarkan memang timbul masalah, tetapi bisa diselesaikan secara nasional, seluruh aparatur bisa menyelesaikan. Selain itu, juga akan mencegah masyarakat dari kesesatan, serta masyarakat yang sudah telanjur sesat dapat kembali ke ajaran yang benar. Dan yang terpenting, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakrukunan bisa terselesaikan," jelasnya.

Sebelumnya Ketua DPW PPP DIY, HM Syukri Fadholi SH, juga meminta pemerintah untuk tegas dalam menyikapi Ahmadiyah. Orang nomor satu di PPP DIY ini berpendapat JAI perlu dibubarkan. **(R-3)-a**

GPK Tolak Ahmadiyah

WONOSARI: Ratusan kader Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Kabupaten Gunungkidul menggelar aksi massa penolakan Ahmadiyah di Wonosari, Minggu (20/3). Mereka meminta pemerintah bersikap tegas untuk membubarkan Ahmadiyah. Usai menggelar aksi di Wonosari mereka berangkat bersama-sama menuju gedung PDHI Alun-alun Utara untuk menggelar aksi serupa. Mereka berangkat dari kantor DPC PPP Kranon Kepek, Wonosari dengan menggunakan mobil dan sepeda motor.

(Bmp)-f

KR-BAMBANG PURWANTO

GPK saat menggelar aksi menolak Ahmadiyah.

DI DIY SUDAH DIBEKUKAN

Kiai Sahal: Ahmadiyah Sesat

PATI (KR) - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KHMA Sahal Mahfudh menegaskan, ajaran Ahmadiyah sesat. Kiai kharismatik ini mengajak kelompok sesat itu segera bertaubat, istighfar, membaca syahadat dan kembali kepada ajaran Islam yang benar. "Perkara mau dibekukan, dibubarkan, dilarang, dibatasi, dibina atau apa namanya terserah pemerintah, bukan kewenangan para ulama lagi. Para ulama dan kiai tugasnya ngajak secara baik-baik kembali ke ajaran yang benar. Mereka jelas-jelas sesat," tegasnya, saat menerima silaturahim pengurus MUI Jateng di kompleks pesantren Maslakul Huda, Kajen, Margoyoso, Pati, Minggu (20/3).

Pengurus MUI terdiri Ketua Umum Drs KH Ahmad Darodji MSi, Sekretaris Prof Dr Ahmad Rofiq MA, Bendahara H Suwanto SE MM dan lain-lain. Hadir juga Wakil Sekjen MUI Pusat Dr H Noor Achmad MA.

Menurut Noor Achmad, saat ini, beberapa daerah sudah melakukan pembekuan terhadap aktivitas Jemaat Ahmadiyah, antara lain DIY, Jabar, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Banten, dan Jatim. "Meski Jatim mendapat perlawanan balik dari Jemaat Ahmadiyah melalui jalur hukum, MUI Pusat akan membantu memberikan advokasi," tegasnya.

Menurut Sekretaris Umum MUI Jateng Prof Dr Ahmad Rofiq MA, pengikut jemaat Ahmadiyah di Jateng jumlahnya 5.625 orang. Paling banyak berada di Kabupaten Wonosobo dan Temanggung. Ia berharap agar pemerintah Jateng proaktif dan mengambil sikap terhadap jemaat Ahmadiyah. "Kalau saat ini di Jateng tidak ada gejolak seperti di daerah lain, bukan berarti tidak ada gejolak. Maka pemerintah harus antisipatif," tegasnya.

Bahkan dikhawatirkan bila Jateng tidak segera bersikap, pengikut ajaran Ahmadiyah dari daerah lain akan ramai-ramai hijrah ke Jateng yang belum menyampaikan larangan. Kiai Sahal sendiri merasa heran, mengapa pemerintah Jateng tidak segera bersikap. "Mestinya pemerintah bisa *ngemong* dan *ngayomi* masyarakat dalam arti prioritas bagian mana yang diemong dan diayomi," tegas-

(Isi)-c

MENTERI AGAMA: KAMI INGIN CARI SOLUSI

Diundang Dialog, Ahmadiyah Tak Hadir

JAKARTA (KR) - Dialog untuk memperoleh masukan masalah Ahmadiyah digelar Kementerian Agama (Kemenag) yang dihadiri dari berbagai kalangan. Namun kesempatan ini tidak dihadiri Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), kendati undangan sudah dilayangkan.

Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari JAI. "Itu justru akan merugikan Ahmadiyah sendiri," katanya di Jakarta, Selasa (22/3).

Hadir dalam dialog dan dengar pendapat ini adalah perwakilan dari LSM pluralisme seperti Wahid Institute, Setara Institute, lembaga negara seperti MUI, BIN, Polri, Jamintel Kejaksaan Agung dan perwakilan kepala daerah yang melarang aktivitas Ahmadiyah di wilayahnya. Sedang dari Ahmadiyah yang hadir dalam pertemuan ini adalah Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) atau Ahmadiyah aliran Lahore.

Suryadharma Ali menegaskan, pihaknya sebenarnya sangat berharap JAI (Ahmadiyah aliran Qodiyan) hadir untuk memberikan penjelasan mengenai ajarannya. "Jika tidak bertentangan silakan jelaskan bagaimana ajaran mereka itu tidak melanggar Islam. Namun, JAI malah tidak hadir," katanya.

Sebelum dialog, Suryadharma menuturkan, tujuan dialog ini untuk memperoleh pandangan dari berbagai perspektif guna mengambil kebijakan tepat dan permanen terkait Ahmadiyah. Jadi, imbuhnya, melalui dialog ini diharapkan dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran.

"Dengan demikian kita dapat mengerti apa yang kita lakukan," kata Menag seraya menyebutkan, melalui dialog ini pemerintah bisa mendapatkan solusi yang memuaskan bagi seluruh pihak. Sebab, posisi pemerintah netral dan tidak memihak. "Karena itu, kami tidak hanya mengundang kelompok yang kontra saja, tapi juga mengundang kelompok yang membela Ahmadiyah," tandasnya.

Sedang Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan anggota GAI, S Ali Yasir, yang hadir memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan bahwa GAI berbeda dengan JAI. "Ahmadiyah yang dimaksud bukan kami," ujar Ali Yasir yang datang dari Yogya.

Ali Yasir menjelaskan, GAI dan JAI secara teologi sangat berbeda. "Secara teologis kami berbeda jauh dengan JAI. Antara lain, (bagi GAI) keyakinan adanya Mirza (Mirza Ghulam Ahmad) tidak begitu saja kami terima, Mirza bukanlah nabi, tidak ada lagi nabi. Tadzkirah bukan karya kami, itu karya Qadiyani," tegasnya.

Wakil GAI ini juga mengaku sangat menyayangkan ketidakhadiran utusan JAI. Bahkan Ali Yasir juga mengaku sempat dilarang pihak JAI untuk hadir. "Seorang Ahmadiyah harusnya taat pada pemerintah. Saya dilarang oleh salah seorang pengurus JAI (untuk hadir di acara dialog)," imbuh Ali. **(Ful)-f**

SOAL DIALOG DINILAI TAK NETRAL

Kemenag Bantah Tudingan Ahmadiyah

JAKARTA (KR) - Tudingan yang dilontarkan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) bahwa pemerintah tidak netral dalam menggelar dialog, langsung dibantah Kementerian Agama (Kemenag). Terhadap hal ini, pihak Kemenag menyatakan tidak mengerti mengapa JAI menuding demikian, padahal dialog dimaksudkan untuk mencari jalan keluar permanen bagi JAI.

"Mudah-mudahan tudingan pemerintah dalam dialog ini tidak netral, hanya kesan mereka (JAI)," kata Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar kepada wartawan di Kantor Kemenag Jakarta, Rabu (23/3).

Disinggung soal ketidakhadiran JAI, menurutnya, hal itu tidak mengganggu jalannya dialog yang dihadiri berbagai elemen ini. Sebab, proses dialog ini merupakan langkah persuasif yang dilakukan pemerintah untuk melakukan yang terbaik bagi solusi persoalan Ahmadiyah.

"Dialog ini kan baru tahap menghimpun pendapat. Setelah itu, ke depannya kami godok mana yang terbaik untuk semua," jelas Nasaruddin.

Ditambahkan, bagi Kemenag jika JAI menggelar dialog sendiri, dengan peserta yang juga ditentukan sendiri, pemerintah selalu siap untuk hadir. "Jadi, kalau JAI mau undang Komnas HAM, DPR, kami akan datang. Apa pun kami layani untuk masyarakat," tegas Nasaruddin.

Soal ketidakhadiran JAI, menurutnya, sikap itu sangat disayangkan karena Ahmadiyah tidak bisa menyampaikan pendapatnya mengenai persoalan yang berkecamuk saat ini. Meski demikian, Nasaruddin tetap berharap Ahmadiyah mau bergabung dan berdiskusi demi kebaikan bersama. Pasalnya, akan lebih baik apabila Ahmadiyah bisa menjelaskan langsung daripada dari pihak kedua atau ketiga.

Di tengah berlangsungnya dialog, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) mendorong Kemenag mengeluarkan rekomendasi agar Presiden mengeluarkan Keppres soal pelarangan Ahmadiyah. Direktur Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), Amin Djamaludin menegaskan, pihaknya bersama ormas Islam lain sepakat mengusulkan Keppres ini sebagai mekanisme konstitusional pelarangan Ahmadiyah.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin yang ikut dalam pertemuan juga menegaskan bahwa kesepakatan larangan Ahmadiyah harus didasarkan pada undang-undang. "Semua sepakat mengusulkan Ahmadiyah dibubarkan," tuturnya. **(Ful)-a**

SOSIALISASI SKB 3 MENTERI

Pemkab Perlu Bentuk FKUB

WONOSARI (KR) - Majelis Ulama Indononesia (MUI) Gunungkidul beserta Pemkab, TNI, Polri dan Kejaksaan bertekad 'mengawal' Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait keberadaan Jemaat Ahmadiyah. Langkah ini dimaksudkan jangan sampai terjadi keresahan di masyarakat.

"Sebab dalam keputusan tersebut terdapat perintah bagi penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk tidak mempengaruhi masyarakat maupun meminta dukungan umum menafsirkan keagamaan yang menyerupai dan menyimpang dari ajaran pokok," kata Ketua MUI Gunungkidul H Sukamto SAg di acara sosialisasi SKB 3 Menteri di aula Kodim 0730 Gunungkidul, Senin (28/3). Kegiatan itu dipandu Dandim 0730 Letkol ARM Budi Eko Mulyono SSos serta diikuti 270 anggota kodim.

Di Gunungkidul lanjutnya, keberadaan JAI ada di Pucanganom Rongkop dan sudah dilakukan pertemuan. Bahkan dalam kesempatan tersebut Jemaat Ahmadiyah sudah sepakat untuk menghentikan kegiatan mereka. Dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan mampu menekan terjadinya keresahan di masyarakat.

"Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebenarnya cukup penting, namun Gunungkidul belum terbentuk, sehingga penting menjadi perhatian pemerintah, agar segera dan secepatnya dilakukan pembentukan FKUB," tukasnya.

Dandim 0730 Gunungkidul Letkol ARM Budi Eko Mulyono SSos usai acara mengungkapkan, melalui sosialisasi ini diharapkan peran TNI untuk menjaga keutuhan wilayah bisa berjalan lancar.

Secara bersama-sama dengan Polri, MUI, Kejaksaan dan pemerintah daerah berkewajiban 'mengamankan' SKB tiga menteri yang merupakan keputusan pemerintah. **(R-2)-m**

KODIM SOSIALISASIKAN SKB 3 MENTERI

Berikan Info Kebijakan Soal Ahmadiyah

WATES (KR) - Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri masing-masing Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah disosialisasikan jajaran Kodim 0731/Kulonprogo, di aula Makodim setempat, Rabu (30/3). Sosialisasi diikuti sekitar 200 personel Kodim dan Persatuan Istri Prajurit Kartika Chandra (Persit).

Dandim 0731/Kulonprogo Letkol Inf Achmad Basar menjelaskan, sosialisasi sebagai upaya memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah terhadap Ahmadiyah kepada prajurit TNI. Dengan sosialisasi prajurit TNI diharapkan mengetahui sekaligus memahami isi SKB 3 Menteri dimaksud.

"Dengan disosialisasikannya SKB 3 Menteri, anggota kami jadi tahu dan menguasai isi keputusan pemerintah, sehingga di lapangan tidak salah melangkah," jelas Letkol Inf Achmad Basar.

Menurutnya, langkah antisipasi yang telah dilakukan jajaran Kodim 0731/Kulonprogo terhadap penyebaran jamaah Ahmadiyah pihaknya telah berkoordinasi dengan kejaksaan, kepolisian dan Pemkab Kulonprogo.

Sementara itu pihak Polres Kulonprogo dalam kesempatan tersebut mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas No 22 Tahun 2009. Program tersebut dilakukan karena banyak anggota TNI mengalami kecelakaan diluar tugas tempur salah satunya kecelakaan lalu lintas. Pihak terkait berharap dengan disosialisasikannya undang-undang tersebut, prajurit paham dan menguasai regulasi, sehingga laka lantas bisa diminimalisir.

Di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan mensosialisasikan cara penanggulangan penyakit HIV/AIDS yang menyebar akibat penyalahgunaan narkoba dan hubungan seks bebas. **(Rul)**-f